



tidak sah secara hukum Islam karena perjanjian tersebut tidak tertulis secara jelas dan gamblang mengenai pembayaran premi, dana klaim asuransi. Perjanjian ini dianggap sepihak karena nasabah tidak menerima bukti kepesertaan asuransi jiwa pada pembiayaan *murābahah*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo, penulis bisa memberikan saran supaya BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo lebih terbuka kepada calon nasabah ataupun nasabah atas keberadaan asuransi jiwa pada pembiayaan di BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo. Yang dimaksud dalam hal ini adalah nasabah mencantumkan asuransi jiwa pada salah satu pasal di akad pembiayaan tersebut sesuai dengan hukum Islam. Sehingga nasabah bisa mengetahui berapa persen BMT UGT Sidogiri membayarkan cicilan premi asuransi jiwa, dan juga nasabah mengetahui seberapa porsi yang akan diterima nasabah saat pengajuan dana klaim asuransi.

Untuk pencairan dana klaim asuransi jiwa pada pembiayaan *murābahah*, BMT UGT Sidogiri cabang Larangan Sidoarjo harus lebih bijak membuat ketentuan kelayakan pencairan klaim asuransi karena dana klaim tersebut sudah menjadi hak nasabah. Asuransi jiwa pada pembiayaan *murābahah* di bentuk untuk mengcover pembiayaan nasabah ketika meninggal, oleh karena itu dana asuransi tersebut harus diterima oleh

